

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada akhir penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan gadai tanah pertanian di nagari talu tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan masyarakat beranggapan bahwa gadai tanah pertanian harus ditebus, maka selama pinjaman itu belum dilunasi tanah pertanian tersebut masih menjadi hak penerima gadai.
2. Kendala dalam pelaksanaan gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yaitu masyarakat tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.
3. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yaitu perlu adanya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional mengenai Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah.

## **B. Saran**

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat penulis memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Diharapkan kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan gadai tanah pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum Nasional yang mengatur tentang masalah gadai dan tidak lagi melakukan gadai tanah secara adat atau kebiasaan yang telah berlangsung lama karena akan menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada Badan Petanahan Nasional untuk dapat melakukan sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari untuk dapat merumuskan cara mengatasi persoalan gadai tanah pertanian yang sudah terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Abdul R.Saliman, 2017 *Hukum Bisnis*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Istiqamah, 2011, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin university, Makassar.
- , 2012, *Hukum Waris dan Benda*, Alauddin University Press, Jakarta.
- Jajuli, M. Sulaeman, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep hukum perdata*, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2013 *Hukum jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Purwati & Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Pujiono, 2012, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Mitra Pustaka, Jember.
- Rahmadi Usman, 2013, *Hukum kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Hayati, Sri Winarsi, Agus Sukamadji, Oemar Muchtar, 2020, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University press, Surabaya.
- Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 2013 *fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Ter Haar, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yusnaedi Achmad, 2015, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Deepublish, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

## **C. Sumber Lain**

Putra, Akbar Ardy, 2022, “*Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo*” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 02, Juni 2022

Tanjung, Irhamni, 2023 “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Gadai Tanah Yang Terjadi Di Masyarakat Kabupaten Karo Pada Desa Gundaling 1 Dan Gundaling 2*” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Volume 4, Nomor 4, Desember 2023

Wirasaputra, Ayub, 2017, “*Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional*”, Journal of Law and Policy Transformation, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017

Yusuf, Nasruddin, 2006, “*Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Al-syir’ah, Volume 4, Nomor 02, Desember 2006